

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN DANA DESA

Santi Septiana
santiseptiana9@gmail.com
Suwardi Bambang Hermanto

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to analyze the perception of apparatus of local government officials based on the principle of Good Corporate Governance with the transparency dimensions, accountability and participation and capacity of local apparatus on the performance of village fund management. This research conducted at Purwosari district, Kediri regency on the parties which involved in the local government management namely village head, village secretary, treasurer, implementer of development activities, implementer of government activities, head of the activity management team and family welfare team. This research used quantitative research. The sample of this research used purposive sampling method based on the determined criteria namely village apparatus of local government Purwoasri district in the management of local fund. Therefore, with 23 village population of Purwoasri with the sample were 112 village apparatus which were located in the area of Purwoasri district. Moreover, this research used multiple linear regression analysis method with SPSS program 22 version. The research result showed that transparency, accountability, and capacity of village apparatus had a significant and positive effect on the performance of local fund management. Meanwhile, the participation did not have any effect on the performance of local fund management.

Keywords: GCG, performance of local fund manageme

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk menganalisis persepsi dari aparatur pemerintah desa berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance* dengan dimensi transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dan kapasitas aparatur desa terhadap kinerja pengelolaan dana desa. Penelitian dilakukan di Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri pada pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana desa yaitu kepala desa, sekretaris desa, bendahara, pelaksana kegiatan pembangunan, pelaksana kegiatan pemerintahan, ketua tim pengelola kegiatan dan tim penggerak kesejahteraan keluarga. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu perangkat desa pemerintahan kecamatan purwoasri dalam pengelolaan dana desa. Dengan populasi 23 desa di Kecamatan Purwoasri, jumlah sampel 112 perangkat desa yang terdapat pada wilayah Kecamatan Purwoasri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa, akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa, dan kapasitas aparatur desa berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa. Sedangkan partisipasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: GCG, kinerja pengelolaan dana desa

PENDAHULUAN

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan Undang-undang tersebut, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa. Budiati *et al.*, (2019: 426) menyatakan Desa mendapatkan alokasi dana yang jumlahnya cukup besar untuk

pembangunan yaitu yang bersumber dari Dana Desa. UU memberikan amanat dan kewenangan kepada desa untuk mengelola dana yang tidak kecil dengan harapan agar dapat dilakukan percepatan pembangunan dengan mengandalkan potensi-potensi lokal setempat (Atiq, 2018). Dana yang relatif besar tersebut harus bisa dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik sehingga tidak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam pengelolaan dana desa. Dengan dana desa, penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat, diharapkan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (6) tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat harus dikelola secara benar dan transparan, oleh aparatur desa. Oleh karena itu pengelolaan dana desa memerlukan perhatian dua hal pokok, yaitu: (1) pengelolaan keuangan yang baik, dan (2) pertanggungjawaban aparatur desa.

Pengelolaan keuangan yang pada pemerintah desa, dapat dicerminkan dengan praktik-praktik pengelolaan pemerintahan yang baik, atau seringkali disebut dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good corporate governance*). *Governance* diartikan sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and services*, sedang praktik terbaiknya disebut *good governance*. Berkaitan dengan pengelolaan dana desa tersebut, terdapat tiga prinsip *good governance* yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas (Soleh *et al.*, 2017). Unsur-unsur pokok upaya perwujudan *good governance* ini adalah transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Namun demikian yang menjadi permasalahan utama dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah kurangnya pemahaman, kesadaran, dan kapasitas di kalangan pelaku khususnya sumber daya manusia aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu, demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik maka pemerintah mencoba mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau dikenal dengan istilah *good corporate governance*. Hal ini muncul sebagai akibat Pendapatan desa yang besar dari beberapa sumber tersebut harus dikelola secara benar dan transparan, untuk itu aparatur desa sebagai aktor dari pengelolaan dana desa dituntut untuk memiliki pemahaman yang baik tentang tata cara dan tata kelola keuangan (Budiati *et al.*, 2019).

Pertanggungjawaban aparatur desa yang akurat harus memiliki prinsip transparansi, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, keadilan dan kemandirian. Sedangkan sebagai praktik pelayanan publik yang baik harus memuat prinsip-prinsip efisiensi, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas (Rahadian, 2008). Pelayanan publik sebagai penggerak utama juga dianggap penting oleh semua aktor dari unsur *good corporate governance*.

Para pejabat publik seperti kepala desa, sekretaris desa, bendahara, pelaksanaan kegiatan pembangunan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan, ketua TPK, dan TP PKK yang memiliki kepentingan terhadap perbaikan kinerja pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan daerah bagi publik sangat penting dilakukan pemerintah daerah demi tercapainya kepuasan kerja pada masyarakat. Pelayanan Publik seperti mengelola dana desa dengan menyelenggarakan pembangunan pada desa. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengisyaratkan pentingnya penerapan

asas-asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif dalam penyusunan anggaran desa. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam pelayanan publik setiap daerah tentunya berbeda. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah dimana setiap daerah melakukan pengelolaan sendiri terhadap keuangannya. Sehingga sampai saat ini masih banyak ditemukan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, juga pada pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang pada umumnya masih belum tertib.

Tahun 2016 Pemkab Kediri mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 218,6 Miliar sebagai upaya untuk mendukung pengembangan potensi desa yang selama ini terkendala faktor pembiayaan (Sri, 2016). Sebagai bentuk dari implementasi *good corporate governance* terkait pengelolaan dana desa, Kabupaten Kediri. Melalui portal e-Planning tersebut semua pelaporan pengelolaan dana desa untuk desa-desa di Kabupaten Kediri dapat dipantau langsung oleh publik. Salah satu tujuan dari web resmi ini adalah agar terbentuk desa mandiri yaitu pemerintahan desa yang mengedepankan transparansi, akuntabel, dan partisipatif dan memiliki pelaporan keuangan yang bagus. Desa-desa di Kabupaten Kediri mempunyai wewenang penuh dalam mengelola keuangan desa. Purwoasri merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kediri yang menerima ADD 24,610,000,000 di tahun 2016 (Sri, 2016). Kecamatan Purwoasri terdiri dari 23 desa yaitu Mranggen, Pesing, Jantok, Ketawang, Wonotengah, Purwoasri, Pandansari, Blawe, Belor, Tugu, Bulu, Purwodadi, Muneng, Klampitan, Sidomulyo, Sumberejo, Kempleng, Woromarto, Merjoyo, Mekikis, Karangpakis, Dayu, dan Dawuhan. Salah satu bentuk dari alokasi dana desa yang dilaksanakan di Kecamatan Purwoasri adalah pembangunan infrastruktur seperti pembangunan saluran air.

Upaya yang dilakukan Pemdes Purwoasri sebagai cerminan pelaksanaan *good corporate governance* tahun sebelumnya adalah melaksanakan rapat koordinasi pembahasan ADD (Alokasi Dana Desa) dan DD (Dana Desa) yang dilaksanakan di Balai Desa. Rapat tersebut bertujuan agar seluruh elemen masyarakat sama-sama mengetahui pemanfaatan dan penggunaan anggaran. Dana Desa harus dimanfaatkan dan digunakan untuk kepentingan Desa dan pelaksanaannya diawasi bersama serta dilengkapi dengan laporan-laporan secara tertulis agar dapat dipertanggungjawabkan. Jika masyarakat menemukan kejanggalan dapat langsung ditanyakan kepada Kelapa Desa atau BPD. Hal-hal tersebut merupakan bentuk implementasi dari prinsip *good corporate governance* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Aparatur desa sebagai aktor dalam pengelola dana desa sangat menentukan keberhasilan program-program pembangunan desa.

Berdasarkan Uraian latar belakang masalah dan judul penelitian di atas, maka rumusan masalah yang dapat disusun dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Kecamatan Purwoasri?, (2) Apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Kecamatan Purwoasri?, (3) Apakah partisipasi berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Kecamatan Purwoasri?, (4) Apakah aparatur pemerintah desa dan kapasitas aparatur berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Kecamatan Purwoasri?. Sedangkan tujuan dari penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut: (1) Menganalisis persepsi akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Kecamatan Purwoasri, (2) Menganalisis persepsi transparansi terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Kecamatan Purwoasri, (3) Menganalisis persepsi partisipasi terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Kecamatan Purwoasri, (4) Menganalisis persepsi kapasitas aparatur terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Kecamatan Purwoasri.

TINJAUAN TEORITIS

Dana Desa

Dalam Undang-undang No 60 Tahun 2014 tentang dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahunnya yang bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Untuk mengantisipasi agar tidak adanya penyimpangan dana desa terkait dengan pengelolaan dana dalam suatu desa. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa dana desa yang digunakan secara efektif dan efisien. Mekanisme *Corporate Governance* digunakan untuk meminimalkan konflik dalam pengelolaan dana desa. *Good Corporate Governance* suatu bagian isu kebijakan strategi dalam memperbaiki kinerja pengelolaan dana desa.

Good Corporate Governance

Secara definisi *Good Corporate Governance* (GCG) diartikan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggungjawab sejalan dengan prinsip demokrasi yang bertujuan untuk menghindari adanya alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif (Eni, 2020). *Good Corporate Governance* menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. *Good Corporate Governance* mendasarkan suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Dalam rangka untuk mendukung terwujudnya tata kelola yang baik *Good Corporate Governance* dalam hal penyelenggaraan yang dilakukan sebuah organisasi, pengelolaan keuangan harus dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik terdapat tiga pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan lainnya dalam mewujudkan *good Corporate governance* adalah: (1) transparansi, yaitu keterbukaan dalam manajemen pemerintah, lingkungan, ekonomi dan sosial; (2) partisipasi, yaitu penerapan pengambilan keputusan yang demokratis serta pengakuan HAM, kebebasan pers dan mengemukakan pendapat/aspirasi masyarakat; (3) akuntabilitas, yaitu kewajiban melaporkan dan menjawab dari yang dititipi amanah untuk mempertanggungjawabkan kesuksesan maupun kegagalan kepada penitip amanah sampai yang memberi amanah puas. Bila belum ada atau tidak mencapai titik puas maka dapat dikenakan sanksi (Niwayan, 2016).

Tranparansi

Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Transparansi merupakan salah satu prinsip dari *good corporate governance*. Transparansi dibangun di atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau (Corynata, 2007).

Akuntabilitas

Akuntabilitas (*accountability*) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Mardiasmo (2012) mendefinisikan akuntabilitas merupakan sebuah kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggung-jawaban yang dikerjakan secara berkala. Risyah dan Idang (2017) juga menyebutkan akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya publik.

Partisipasi

Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung. Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah. Partisipatif berarti bahwa setiap orang, siapa saja dapat turut serta dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya kebebasan berasosiasi tersebut dapat memastikan proses pengelolaan dana desa dilaksanakan dengan baik, salah satunya yaitu pengambilan keputusan bersama sebagai alat komunikasi dalam mengawasi proses GCG (Coryanata, 2007).

Kapasitas Aparatur Desa

Kapasitas didefinisikan sebagai kemampuan manusia, lembaga dan masyarakat untuk melakukan keberhasilan, untuk mengidentifikasi dan mencapai tujuan mereka, dan untuk mengubah bila diperlukan untuk tujuan keberlanjutan, pengembangan dan kemajuan. Dalam konteks pengelolaan keuangan, aparatur yang memiliki kapasitas berupa kompetensi akuntansi yang baik sehingga mampu memahami logika akuntansi yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan yang profesional (Rafar *et al.*, 2015).

Kinerja Pengelolaan Dana Desa

Kinerja dapat didefinisikan sebagai kemampuan dalam melaksanakan suatu kegiatan dalam pencapaian tujuan, visi, dan misi sebuah organisasi (Nurdianti dan Anita, 2014). Kinerja pengelolaan dana desa perlu diukur untuk menilai sejauh mana perbedaan antara rencana yang telah disusun dengan yang sudah direalisasi, jadwal pelaksanaan yang direncanakan dengan realisasinya serta antara hasil yang diperoleh dengan hasil yang diharapkan (Wibowo, 2011). Kinerja pengelolaan keuangan yang baik diukur berdasarkan indikator efisiensi, efektifitas, ekonomis dan pelaporan yang memadai (Mardiasmo, 2009: 4). Kinerja pengelolaan dana desa dapat dikatakan baik dengan adanya penerapan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) yang meliputi: (1) transparansi dalam dalam terbukannya informasi pengelolaan dan desa yang dapat dilihat secara bebas oleh masyarakat, (2) akuntabilitas dengan dapat mempertanggungjawabkan pelaporan dalam penggunaan dana desa, (3) partisipasi yang melibatkan masyarakat dalam melakukan pengambilan keputusan bersama, (4) kapasitas aparatur desa yang memadai untuk melakukan fungsi secara efektif, efisien dan mencapai tujuan mereka dalam pengembangan kemajuan.

Pengembangan Hipotesis

Transparansi Berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa

Transparan adalah suatu keterbukaan yang dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mengakses guna mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian transparansi berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan dana desa dikarenakan sebuah transparansi merupakan suatu alat yang digunakan oleh agent untuk menunjukkan bahwa harapan atau tujuan yang diinginkan oleh principal telah dipublikasikan. Hal ini akan mempengaruhi kinerja dari organisasi tersebut. Selanjutnya, dijelaskan bahwa prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan melalui sosialisasi kepada masyarakat disetiap pencairan dana dari pendapatan transfer, pemasangan baliho tentang Laporan Pertanggungjawaban dari Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan.

H₁: Transparansi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan dana desa Pemerintah Kecamatan Purwoasri.

Akuntabilitas Berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban seseorang ataupun suatu organisasi tertentu yang mempunyai amanat untuk menjalankan tugas yang telah diberikan. Sehingga Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja organisasi dikarenakan, akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban dari agent kepada principal. Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja organisasi dikarenakan, akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban dari agent kepada principal. Kesuksesan kinerja organisasi ditentukan dari keselarasan antara agent dan principal, akuntabilitas yang baik dalam organisasi akan mengurangi konflik yang terjadi. Sehingga akuntabilitas berpengaruh terhadap kesuksesan dari organisasi tersebut. Kesuksesan dari organisasi dapat dilihat dari kinerja yang baik, hal ini juga didukung oleh penelitian Risyah dan Idang (2017) dan Gayatri *et al.*, (2017).

H₂: Akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan dana desa Pemerintah Kecamatan Purwoasri.

Partisipasi Berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa

Partisipatif adalah keikutsertaan orang yang bersangkutan yang mempunyai hak dalam pengambilan bagian setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa serta masyarakat untuk mendapatkan keputusan. Partisipasi yang mempunyai peran dalam mengambil keputusan untuk menjalankan suatu akuntabilitas, partisipasi masyarakat dalam penyusunan juga pengawasan terhadap organisasi. Dalam pengelolaan dana desa partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk membuat suatu keputusan. Hal ini dapat membuat tujuan antara agent dan principal berjalan lurus dan terhindar dari konflik. Coryanata (2007) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat mempunyai peran penting dalam otonomi daerah karena dalam partisipasi terdapat aspek pengawasan dan aspirasi.

H₃: Partisipasi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan dana desa Pemerintah Kecamatan Purwoasri.

Kapasitas Aparatur Berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa

Kapasitas aparatur suatu kemampuan yang dimiliki oleh individu atau organisasi atau sistem dalam melaksanakan fungsi-fungsinya sesuai dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan. Sedangkan kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertua dalam *strategic planning* suatu organisasi (Mahsun, 2014: 25). Dalam konteks pengelolaan keuangan, aparatur yang

memiliki kapasitas berupa kompetensi akuntansi yang baik sehingga mampu dasar dalam pengelolaan keuangan yang profesional (Rafar *et al.*, 2015).

H₄: Kapasitas aparatur memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan dana desa Pemerintah Kecamatan Purwoasri.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Populasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menganalisis data primer berupa kuesioner. Data Primer merupakan gambaran dari sumber penelitian yang diperoleh penelitian secara langsung/survei. Penelitian kuantitatif ini hubungan antar variabel akan dianalisa dengan memakai teori yang obyektif.

Adapun populasi dalam penelitian ini terdiri 23 desa dengan 161 perangkat desa yang terdapat pada wilayah Kecamatan Purwoasri. Penelitian melakukan sensus pada setiap desa. Desa yang digunakan sebagai obyek penelitian adalah desa di Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri.

Teknik Pengambilan Sampel

Sampel adalah beberapa populasi yang mempunyai karakter tertentu yang telah ditetapkan yang nantinya berguna dalam penelitian. Untuk penentuan teknik pengambilan sampelnya sendiri penelitian menggunakan *purposive sampling*. Dalam *purposive sampling* ini, teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016:96).

Penyebaran kuesioner 161 ke 23 desa dengan 7 perangkat desa. Namun tidak semua aparatur desa mengisi kuesioner tersebut sehingga kuesioner yang diterima kembali sebanyak 112 kuesioner dengan 16 desa dan yang tidak kembali 49 kuisoner dengan 7 desa. Dalam penelitian ini jumlah sampel (responden) yang diterima kembali sebanyak 112 sampel yang diambil dari sisi utara 4 kuesioner, selatan 4 kuesioner, timur 4 kuesioner dan 4 kuesioner dari sisi barat desa kecamatan purwoasri.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penelitian menggunakan beberapa cara untuk mendapatkan data dan hasil penelitian yang sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh berasal dari kuisoner. Kuisoner yang merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi sejumlah pertanyaan secara tertulis kepada responden untuk dijawab (Zahro, 2012).

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian adalah topik permasalahan yang telah ditentukan oleh peneliti untuk diuji dan berguna untuk memperoleh informasi yang diharapkan sehingga dapat memperoleh jawaban berupa kesimpulan berdasarkan informasi yang didapat. Variabel dalam penelitian ini terbagi menjadi dua variabel yakni variabel independen dan variabel dependen.

Variabel independen merupakan variabel yang berguna untuk menjelaskan dan mempengaruhi variabel lainnya, sedangkan variabel dependen digunakan sebagai penjelasan dan dipengaruhi oleh variabel independen. Kedua variabel ini sering digunakan karena saling berpengaruh dan mempunyai kemampuan dalam pengaplikasian yang luas daripada variabel lainnya. Menurut Sekaran (2011: 117) ketika variabel independen digunakan maka variabel dependen juga digunakan bersamaan, dan setiap ada kenaikan variabel dependen maka diikuti pula kenaikan atau penurunan variabel dependen.

Kinerja Pengelolaan Dana Desa

Kinerja pengelolaan keuangan desa adalah hasil kerja atau prestasi aparatur desa dalam melaksanakan seluruh kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Munti dan Fahlevi, 2017). Kinerja pengelolaan dana desa adalah alat ukur yang digunakan oleh perangkat desa untuk mengukur sejauh mana keberhasilan perangkat desa dalam menjalankan tugasnya dalam pengelolaan dana desa. Adapun Instrumen kuesioner utama penelitian ini mengacu pada penelitian Munti dan Fahlevi (2017) yang terdapat 6 indikator yaitu: (a) Desa kami telah mengalokasikan dana desa dengan baik, (b) Desa kami telah merealisasikan Anggaran Dana Desa dengan hemat, (c) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) kami memuat mengenai program kerja yang terukur pendanaannya, (d) Laporan keuangan yang kami sajikan telah memuat dan mengungkapkan informasi yang cukup dan memadai, (e) Program yang sudah dilaksanakan di desa kami sesuai dengan kebutuhan masyarakat, (f) Pembangunan di desa kami sudah tercapai sesuai dengan target yang telah direncanakan. Pengukuran yang digunakan variabel dalam penelitian menggunakan skala likert. Sugiyono (2013) menyatakan bahwa skala likert digunakan untuk mengatur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian ini skala likert dikategorikan sebagai berikut: (a) Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), (b) Angka 2 = Tidak Setuju (TS) (c) Angka 3= Setuju (S), (d) Angka 4 = Sangat Setuju (SS).

Transparansi

Transparansi yang merupakan kebebasan dan keterbukaan memperoleh informasi untuk dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat (Astuti dan Yulianto, 2016). Adapun Instrumen kuesioner transparansi menurut (Astuti dan Yulianto, 2016) yang terdiri dari 4 indikator yaitu : (a) Mekanisme Alokasi penggunaan dana desa disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa, dan selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan RKPDesa dan APBDDesa, (b) Data dan informasi yang menyangkut pengelolaan dana desa dapat diperoleh dengan dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, serta cara yang sederhana oleh para pemangku kepentingan, (c) Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) segala proses dan tahapan penyusunan dilakukan secara tertib, aman, dan terbuka, (d) Mekanisme Aparatur Pemerintah Desa menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis dan dipublikasikan menggunakan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Pengukuran yang digunakan variabel dalam penelitian menggunakan skala likert. Sugiyono (2013) menyatakan bahwa skala likert digunakan untuk mengatur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian ini skala likert dikategorikan sebagai berikut: (a) Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), (b) Angka 2 = Tidak Setuju (TS) (c) Angka 3= Setuju (S), (d) Angka 4 = Sangat Setuju (SS).

Akuntabilitas

Akuntabilitas yang merupakan kewajiban bagi pemerintah desa untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya (Astuti dan Yulianto, 2016). Adapun Instrumen kuesioner utama penelitian ini mengacu pada penelitian (Astuti dan Yulianto, 2016) yang terdapat 4 indikator yaitu: (a) Dalam pengelolaan keuangan desa, realisasi anggaran didasarkan pada RKPDesa dan APBDDesa yang telah ditetapkan sebelumnya, (b) Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Aparatur Pemerintah Desa telah menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur operasional standar yang berlaku, (c) Keuangan desa dan kekayaan milik desa dikelola dan dipertanggungjawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi dan juga kepada masyarakat/public, (d) Pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa

dilaksanakan secara periodik melalui laporan keuangan dan disampaikan secara tepat waktu. Pengukuran yang digunakan variabel dalam penelitian menggunakan skala likert. Sugiyono (2013) menyatakan bahwa skala likert digunakan untuk mengatur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian ini skala likert dikategorikan sebagai berikut: (a) Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), (b) Angka 2 = Tidak Setuju (TS) (c) Angka 3= Setuju (S), (d) Angka 4 = Sangat Setuju (SS).

Partispasi

Partisipasi yang merupakan keikutsertaan masyarakat dalam segala hal yang berhubungan untuk pengambilan keputusan yang demokratis serta dalam program dan kegiatan desa (Astuti dan Yulianto, 2016). Adapun Instrumen kuesioner utama penelitian ini mengacu pada penelitian (Astuti dan Yulianto, 2016) yang terdapat 4 indikator yaitu: (a) Pemerintahan desa memfasilitasi forum perangkat desa yang membahas prioritas program dan kegiatan sebagai upaya penyempurnaan rancangan rencana kerja yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa, (b) Terdapat sistem pengaduan masyarakat yang bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa, (c) Penyusunan RKPDesa dan APBDesa didasarkan pada program atau kegiatan yang berjalan pada periode sebelumnya dengan mempertimbangkan usulan dari masyarakat, (d) Masyarakat ikut berperan aktif dalam proses penyusunan RKPDesa dan APBDesa mulai dari memberikan usulan, pendapat, kritik, dan saran. Pengukuran yang digunakan variabel dalam penelitian menggunakan skala likert. Sugiyono (2013) menyatakan bahwa skala likert digunakan untuk mengatur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian ini skala likert dikategorikan sebagai berikut: (a) Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), (b) Angka 2 = Tidak Setuju (TS) (c) Angka 3= Setuju (S), (d) Angka 4 = Sangat Setuju (SS).

Kapasitas Aparatur

Kapasitas aparatur yang merupakan kemampuan aparatur desa dalam menjalankan fungsinya sebagai pengelolaan keuangan berupa kompetensi akuntansi yang baik sehingga mampu memahami logika akuntansi yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan yang profesional (Rafar *et al.*, 2015). Adapun Instrumen kuesioner utama penelitian ini mengacu pada penelitian (Rafa *et al.*, 2015) yang terdapat 7 indikator yaitu: (a) Kami sebagai aparatur desa memahami semua peraturan mengenai pengelolaan keuangan desa, (b) Setiap pelatihan teknis tentang pengelolaan keuangan desa yang diadakan di kabupaten maupun di kecamatan selalu kami ikuti, (c) Kami teliti dalam menyelesaikan tugas dan fungsi sebagai aparatur desa, (d) Tugas-tugas yang kami laksanakan sebagai aparatur desa cepat dan tepat waktu, (e) Kami sebagai aparatur desa mampu menyusun kegiatan sesuai dengan program yang telah direncanakan sebelumnya, (f) Kami sebagai aparatur desa mampu mempertanggungjawabkan kinerja yang telah dihasilkan, (g) Kami sebagai aparatur desa paham dan terampil dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. Pengukuran yang digunakan variabel dalam penelitian menggunakan skala likert. Sugiyono (2013) menyatakan bahwa skala likert digunakan untuk mengatur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian ini skala likert dikategorikan sebagai berikut: (a) Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), (b) Angka 2 = Tidak Setuju (TS) (c) Angka 3= Setuju (S), (d) Angka 4 = Sangat Setuju (SS).

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan langkah yang penting karena terkait analisis data yang berguna dalam menentukan hasil penelitian (Sugiono, 2009:15). Setelah menyebar kuesioner kepada responden, peneliti akan menganalisa dan berikutnya akan menggunakan Aplikasi SPSS sebagai analisa datanya. Pengukuran jawaban responden dalam bentuk ukuran skala likert yang mana skala ini menilai sikap, pendapat, dan persepsi responden mengenai fenomena sosial.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Obyek Penelitian

Obyek yang digunbakan dalam penelitian ini adalah Kecamatan Purwoasri. Kecamatan Purwoasri yang terdiri dari 23 desa dan memiliki luas wilayah 42,14 Km². Batas-batas wilayah Kecamatan Purwoasri secara geografis menurut Pemerintahan Kecamatan Purwoasri yaitu : (1) Sebelah Utara yaitu Kecamatan Papar, (2) Sebelah selatan yaitu sungai Brantas, (3) Sebelah Barat yaitu Kabupaten Jombang, (4) Sebelah Timur yaitu Kecamatan Kunjang. Jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Purwoasri berjumlah 61.707 penduduk yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebanyak 29.512 dan penduduk perempuan sebanyak 31.995. Kecamatan Purwoasri merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Kediri yang menerima dana desa, sehingga aparatur desa sangat menentukan kinerja pengelolaan dana desa. Kinerja pengelolaan dana desa sampai saat ini belum ada standar yang dapat diterapkan diseluruh Indonesia terkait kualitas aparatur yang kompeten dalam mengelola dana desa. Sehingga pemerintah desa memiliki kinerja yang berbeda-beda dalam mengelola dana desa. Dalam hal ini aparatur desa harus memahami prinsip tata kelola yang baik (*good corporate governance*) yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Aparatur desa sebagai aktor dalam pengelola dana desa sangat menentukan keberhasilan program-program pembangunan desa.

Populasi dan Sampel

Penelitian telah menentukan populasi yaitu perangkat desa yang berjumlah 161 orang lalu dipilih dengan metode *purposive sampling*. Penyebaran kuesioner 161 ke 23 desa dengan 7 perangkat desa. Namun tidak semua aparatur desa mengisi kuesioner tersebut sehingga kuesioner yang diterima kembali sebanyak 112 kuesioner dengan 16 desa dan yang tidak kembali 49 kuisoner dengan 7 desa. Dalam penelitian ini jumlah sampel (responden) yang diterima kembali sebanyak 112 sampel yang diambil dari sisi utara 4 kuesioner, selatan 4 kuesioner, timur 4 kuesioner dan 4 kuesioner dari sisi barat desa kecamatan purwoasri.

Tabel 1
Kriteria Pemilihan Sampel

Kriteria	Jumlah Desa	Jumlah Responden
Jumlah Responden Aparatur Desa dalam Penyebaran Kuisoner	23	161
Jumlah Respoden Aparatur desa yang mengisi kuisoner atau kuisoner diterima kembali	16	112
Jumlah penyebaran kuisoner yang tidak kembali	7	49
Persentase Pengambilan Kuesioner		69,57%

Sumber : Data Primer Diolah, Tahun 2021

Penelitian ini mengambil objek pada perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa. Dari 112 responden yang dapat digunakan, didapatkan informasinya mengenai karakteristik responden yang berpartisipasi seperti:

Tabel 2
Deskripsi responden

Karakteristik		Jumlah	Presentase
I	Usia		
	Dibawah 35 tahun	7	3.95%
	35-45 tahun	28	28.09%
	46-55 tahun	65	55.48%
	Diatas 55 tahun	12	12.48%
	Total	112	100%
II	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	102	93.05%
	Perempuan	10	6.95%
	Total	112	100%
II	Pendidikan		
I	SMP	4	5.50%
	SMA	75	60.71%
	D3	12	12.38%
	S1	21	21.41%
	Total	112	100%
I	Jabatan		
V	Kepala Desa	16	14.29%
	Sekretaris Desa	16	14.29%
	Bendahara	16	14.29%
	Pelaksana Kegiatan	16	14.29%
	Pembangunan	16	14.29%
	Pelaksana Kegiatan	16	14.29%
	Pemerintahan	16	14.29%
	Ketua TPK		
	TP PKK		
	Total	112	100%
V	Masa Bekerja		
	< 5 tahun	28	25.78%
	5-15 tahun	39	33.19%
	15-25 tahun	28	25.78%
	> 25 tahun	17	15.25%
	Total	112	100%

Sumber : Data Primer Diolah, Tahun 2021

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif merupakan pengujian untuk mengetahui gambaran data yang digunakan untuk menganalisa data yang telah terkumpul dengan aplikasi nilai minimum, nilai maximum, nilai rata-rata, dan nilai standar deviasi. Berikut ini tersaji hasil uji statistik deskriptif dari variabel transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kapasitas aparatur desa dan kinerja pengelolaan dan desa.

Tabel 3
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Kisaran Teoritis			Kisaran Aktual			Std. Deviation
		Minimum	Maximum	Mean	Minimum	Maximum	Mean	
Transparansi	112	4	16	10	10	16	13,76	1,595
Akuntabilitas	112	4	16	10	8	16	13,01	1,527
Partisipasi	112	4	16	10	10	16	13,14	1,488
Kapasitas Aparatur Desa	112	7	28	17,5	20	26	23,26	2,091

Kinerja Pengelolaan Dana Desa	112	6	24	15	16	24	20,13	2,175
-------------------------------------	-----	---	----	----	----	----	-------	-------

Sumber : Data Primer Diolah, Tahun 2021

Variabel transparansi diukur dengan menggunakan instrumen yang terdiri dari 4 pertanyaan. Seperti terlihat pada tabel di atas, dari 112 responden dihasilkan rentang aktual 10-16, artinya tingkat transparansi yang rendah berada pada kisaran 10 dan tingkat transparansi yang lebih tinggi berada pada kisaran 16 sedangkan rentang yang mungkin terjadi adalah antara 4 (menunjukkan transparansi yang paling rendah) sampai 16 (menunjukkan transparansi yang paling tinggi). Sedangkan untuk mean teoritis adalah 10 dan mean aktual sebesar 13,76. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin besar transparansi yang diterapkan oleh aparatur desa. Pemerintah desa memfasilitasi penyebaran informasi pengelolaan keuangan desa, dan pemerintah desa menyediakan informasi publik secara terbuka agar masyarakat dapat mengetahui penggunaan dari APBDes. Hal ini memberikan gambaran bahwa rata-rata transparansi pengelolaan keuangan desa telah dilakukan secara transparansi oleh pemerintah desa.

Variabel akuntabilitas diukur dengan menggunakan instrumen yang terdiri dari 4 pertanyaan. Seperti terlihat pada tabel di atas, dari 112 responden dihasilkan rentang aktual 8-16, artinya tingkat akuntabilitas yang rendah berada pada kisaran 8 dan tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi berada pada kisaran 16 sedangkan rentang yang mungkin terjadi adalah antara 4 (menunjukkan akuntabilitas yang paling rendah) sampai 16 (menunjukkan akuntabilitas yang paling tinggi). Sedangkan untuk mean teoritis adalah 10 dan mean aktual sebesar 13,01. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin besar akuntabilitas aparatur desa. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa telah dipertanggungjawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi dan dilakukan secara konsisten sesuai prosedur operasional standar yang berlaku. Hal ini memberi gambaran bahwa secara keseluruhan akuntabilitas telah dilakukan oleh aparat desa dalam pelaksanaan dana desa.

Variabel partisipasi diukur dengan menggunakan instrumen yang terdiri dari 4 pertanyaan. Seperti terlihat pada tabel di atas, dari 112 responden dihasilkan rentang aktual 10-16, artinya tingkat partisipasi yang rendah berada pada kisaran 10 dan tingkat partisipasi yang lebih tinggi berada pada kisaran 16 sedangkan rentang yang mungkin terjadi adalah antara 4 (menunjukkan partisipasi yang paling rendah) sampai 16 (menunjukkan partisipasi yang paling tinggi). Sedangkan untuk mean teoritis adalah 10 dan mean aktual sebesar 13,14. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin besar partisipasi aparatur desa. pemerintah desa memberikan ruang kontrol bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam guna melakukan *check and balance* dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini memberikan gambaran bahwa secara keseluruhan partisipasi masyarakat telah dilakukan oleh aparat desa dalam pelaksanaan alokasi dana desa, hanya perlu peningkatan dari pemerintah desa untuk lebih proaktif melibatkan seluruh masyarakat.

Variabel kapasitas aparatur desa diukur dengan menggunakan instrumen yang terdiri dari 7 pertanyaan. Seperti terlihat pada tabel di atas, dari 112 responden dihasilkan rentang aktual 20-26, artinya tingkat kapasitas aparatur desa yang rendah berada pada kisaran 20 dan tingkat kapasitas aparatur desa yang lebih tinggi berada pada kisaran 26 sedangkan rentang yang mungkin terjadi adalah antara 7 (menunjukkan kapasitas aparatur desa yang paling rendah) sampai 28 (menunjukkan kapasitas aparatur desa yang paling tinggi). Sedangkan untuk mean teoritis adalah 17,5 dan mean aktual sebesar 23,26. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin besar kapasitas aparatur desa. Perangkat desa memiliki kemampuan dalam mengelola dana desa dan aparat perangkat desa sudah dapat memahami isi dari peraturan-peraturan terkait pengelolaan dana desa. Hal ini memberi

gambaran secara umum seperti desa sudah memiliki kapasitas atau kemampuan dalam mengelola dana desa.

Variabel kinerja pengelolaan dana desa diukur dengan menggunakan instrumen yang terdiri dari 6 pertanyaan. Seperti terlihat pada tabel di atas, dari 112 responden dihasilkan rentang aktual 16-24, artinya tingkat kinerja pengelolaan dana desa yang rendah berada pada kisaran 16 dan tingkat kinerja pengelolaan dana desa yang lebih tinggi berada pada kisaran 24 sedangkan rentang yang mungkin terjadi adalah antara 6 (menunjukkan kinerja pengelolaan dana desa yang paling rendah) sampai 26 (menunjukkan kinerja pengelolaan dana desa yang paling tinggi). Sedangkan untuk mean teoritis adalah 15 dan mean aktual sebesar 20,13. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin besar kinerja pengelolaan dana desa yang didapatkan, bahwa laporan keuangan desa dilaporkan dan lebih tinggi dan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan tujuan atau target yang ditetapkan. Hal ini memberi gambaran kinerja pengelolaan keuangan desa telah berjalan optimal.

Uji Validitas

Uji signifikan dilakukan dengan membandingkan antara nilai r hitung dan r tabel dengan tingkat signifikan sebesar 0,05. Menurut Ghozali (2018) menyatakan jika nilai r hitung $>$ r tabel maka nilainya positif dan indikator tersebut dinyatakan valid. Untuk menguji signifikansi dilakukan dengan cara membandingkan nilai r hitung dengan r tabel *degree of freedom* (df)= $n-2$, dalam hal ini jumlah sampel yaitu 112 maka $df=110$ sedangkan r hitung dengan melihat tampilan output *Cronbach Alpha* pada kolom *Correlated Item-Total Correlation*, kemudian nilai *Corrected Item-Total Correlation* dibandingkan dengan hasil perhitungan r tabel. Jika r hitung lebih besar dari r tabel maka dapat disimpulkan bahwa semua indikator valid. Adapun nilai r tabel diketahui sebesar 0.1857. Berikut ini adalah hasil uji validitas:

Tabel 4
Uji Validitas

Nama Variabel	Correlations
Transparansi (X_1)	
X1.1	0,729
X1.2	0,752
X1.3	0,810
X1.4	0,809
Akuntabilitas (X_2)	
X2.1	0,630
X2.2	0,881
X2.3	0,772
X2.4	0,800
Partisipasi (X_3)	
X3.1	0,717
X3.2	0,832
X3.3	0,709
X3.4	0,777
Kapasitas Aparatur Negara (X_4)	
X4.1	0,489
X4.2	0,667
X4.3	0,652
X4.4	0,663
X4.5	0,808
X4.6	0,696
X4.7	0,533

Kinerja (Y)	
Y1.1	0,835
Y1.2	0,650
Y1.3	0,719
Y1.4	0,544
Y1.5	0,676
Y1.6	0,835

Sumber : Data Primer Diolah, Tahun 2021

Berdasarkan skor jawaban dari variabel dinyatakan valid karena dengan melihat angka di kolom Pearson correlation contoh dari variabel transparansi $X_{1.1} = 0,729$ angka tersebut dari r hitungan 1 (angka ini merupakan 112 responden) diikuti dengan contoh variabel akuntabilitas $X_{2.1} = 0,630$ angka tersebut dari r hitungan 1 (angka ini merupakan 112 responden), dan variabel partisipasi dengan contoh $X_{3.1} = 0,717$ angka tersebut dari r hitungan 1 (angka ini merupakan 112 responden) serta variabel kapasitas aparatur contohnya $X_{4.1} = 0,489$ angka tersebut dari r hitungan 1 (angka ini merupakan 112 responden) yang terakhir variabel kinerja pengelolaan dana desa dengan contoh $Y_{1.1} = 0,835$ angka tersebut dari r hitungan 1 (angka ini merupakan 112 responden).

Uji Reabilitas

Uji Reliabilitas merupakan teknik pengujian yang digunakan untuk mengukur konsistensi jawaban dari setiap variabel yang mana apabila variabel yang digunakan berbeda maka tetap sama dan konsisten jawabannya. Hal ini agar dapat dinyatakan reliabel apabila nilai *cronbach alpha* > 0,60 atau 60%. Berikut hasil pengujiannya.

Tabel 5
Uji Reliabilitas

Nama Variabel	Cronbach's Alpha
Transparansi (X_1)	0,779
Akuntabilitas (X_2)	0,774
Partisipasi (X_3)	0,756
Kapasitas Aparatur Negara (X_4)	0,769
Kinerja (Y)	0,803

Sumber : Data Primer Diolah, Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa seluruh variabel yang ada dinyatakan *reliable*, karena nilai *cronbach alpha* dari variabel memiliki nilai diatas 0,06.

Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variable pengganggu (residual) berdistribusi normal atau tidak. Pengujian ini menggunakan pendekatan *Kolmogorov-Smirnov*, yang mana apabila nilai *asympt. Sig* atau tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 dinyatakan berdistribusi normal. Begitu juga sebaliknya bila signifikansi kurang dari 0,05 dinyatakan tidak normal. Hasil dari Uji Normalitas yaitu sebagai berikut.

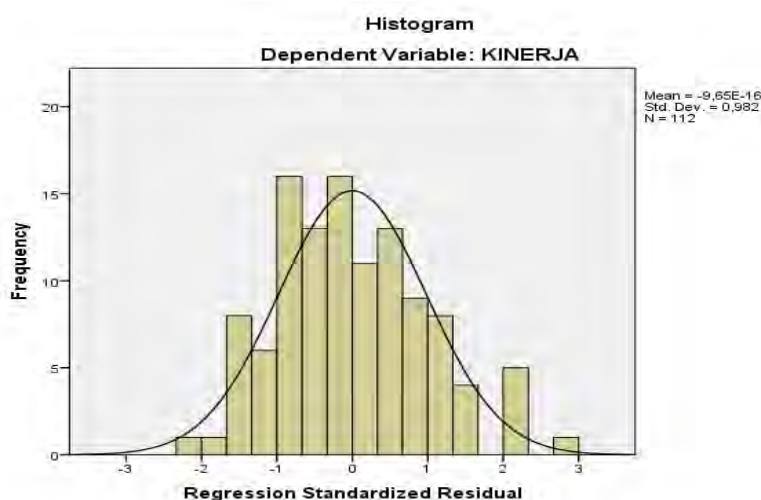
Tabel 6
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		112
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.000
	Std. Deviation	1.73998314
Most Extreme Differences	Absolute	.072

	Positive	.072
	Negative	-.040
Test Statistic		.072
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200

Sumber : Data Primer Diolah, Tahun 2021

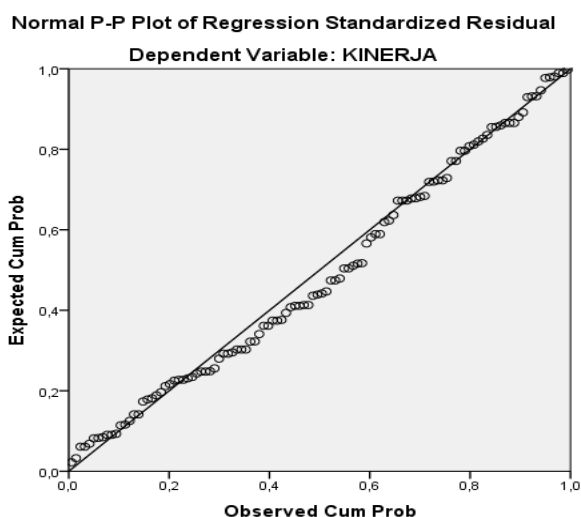
Dilihat dari tabel diatas menunjukkan bahwasannya nilai *Asymp. Sig* sebesar 0,200 sehingga nilai *Asymp. Sig* lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu data peneliti dinyatakan berdistribusi normal dan data biasa digunakan untuk penelitian.



Gambar 1

Grafik Histogram

Sumber : Data Primer Diolah, Tahun 2021



Gambar 2

Grafik P-Plot Test

Sumber : Data Primer Diolah, Tahun 2021

Data pada grafik histogram dan p-plot test di atas terdistribusi dengan normal dikarenakan data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk menguji model regresi apakah terdapat korelasi antar variabel independen atau tidak. Uji ini dapat dideteksi dengan menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai toleransi, yang ketentuan nilai VIFnya tidak lebih dari 10 dan nilai toleransi lebih besar dari 0,1. Hasil dari Uji Multikolinearitas disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 7
Hasil Uji Murikolineritas

Model	Coefficients	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Transparansi (X_1)	.675	1.482
Akuntabilitas (X_2)	.829	1.206
Partisipasi (X_3)	.686	1.458
Kapasitas Aparatur Negara (X_4)	.915	1.093

a. Dependent Variable: Kinerja (Y)

Sumber : Data Primer Diolah, Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai toleransi masing-masing variabel lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Oleh karena itu penelitian ini dinyatakan lulus uji multikolinearitas sehingga data dapat digunakan untuk penelitian.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas merupakan pengujian asumsi residual yang menggunakan varians tidak konstan yang mana dapat dideteksi dengan metode chart *scatterplot*. Menurut Ghozali (2018:38). Uji heteroskedastisitas dengan uji glejser bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusan dengan ketentuan yaitu: 1) Tidak terjadi heteroskedastisitas, jika nilai hitung lebih kecil dari tabel dan nilai signifikan lebih besar dari 0,05. 2) Terjadi heteroskedastisitas, jika nilai hitung lebih besar dari tabel dan nilai signifikan kecil dari 0,05.

Tabel 8
Uji Heteroskedastisitas
Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	2.640	1.711		1.543	.126
Transparansi (X_1)	-.065	.074	-.102	-.872	.385
Akuntabilitas (X_2)	-.047	.070	-.071	-.670	.505
Partisipasi (X_3)	.054	.079	.079	.685	.495
Kapasitas Aparatur Negara (X_4)	-.019	.049	-.039	-.390	.697

Sumber : Data Primer Diolah, Tahun 2021

Berdasarkan uji heteroskedastisitas dengan metode glejser diperoleh nilai signifikansi (X_1) 0,385 (X_2) 0,505, (X_3) 0,495 dan (X_4) 0,697 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan data tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Uji Koefisien Determinasi

Pengujian Koefisien Determinasi digunakan untuk menunjukkan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi yang telah ditetapkan dalam koefisien determinasi ini dapat dilihat melalui hasil dari angka koefisien determinasi (R^2) dari hasil output SPSS. Nilai koefisien determinasi R^2 mulai dari angka nol sampai dengan satu. Ketentuan penilaian pengujian ini yaitu apabila nilai $R^2 = 0$ maka tidak ada sama sekali variabel independen yang berpengaruh pada variabel dependen, dan apabila $R^2 = 1$ maka dapat dikatakan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sangat baik. Berikut ini tersaji hasil output SPSS terkait uji determinasi dari data penelitian.

Tabel 9
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.600 ^a	.360	.336	1.772

a. Predictors: (Constant), KAPASITAS_APARATUR_DESA, TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, PARTISIPASI

Sumber : Data Primer Diolah, Tahun 2021

Berdasarkan tabel output SPSS "Model Summary" diatas, diketahui koefisien determinasi atau R^2 adalah sebesar 0,360. Nilai R^2 0.360 ini berasal dari pengkuadratan nilai koefisien atau "R", yaitu $0,600 \times 0,600 = 0,360$. Besarnya angka koefisien determinasi (R^2) adalah 0,360 atau sama dengan 36%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel independen (X_1) dan (X_2) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) sebesar 36%. Sedangkan sisanya ($100\% - 36\% = 64\%$) dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti.

Besarnya pengaruh variabel lain disebut juga sebagai eror (e). Untuk menghitung nilai error tersebut dapat menggunakan rumus $e = 1 - R^2$. Besarnya nilai koefisien determinasi atau R^2 ini umumnya berkisar antara 0-1. Namun demikian, jika dalam sebuah penelitian dijumpai R^2 bernilai minus atau negatif (-), maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Selanjutnya, semakin kecil nilai koefisien determinasi (R^2), maka pengaruh variabel (X) terhadap variabel (Y) semakin lemah. Sebaliknya, jika nilai R^2 semakin mendekati angka 1, maka pengaruh tersebut akan semakin kuat.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F merupakan uji ketepatan atau kelayakan (*goodness to fit*) dalam hal ini untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh pada penelitian. Dalam pengujiannya Uji F apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen dan dinyatakan layak. Begitu juga sebaliknya bilamana nilai signifikansi $> 0,05$ maka variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen dan dinyatakan tidak layak.

Tabel 10
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	188.934	4	47.233	15.039	.000 ^b
	Residual	336.057	107	3.141		
	Total	524.991	111			

a. Dependent Variable: KINERJA

b. Predictors: (Constant), KAPASITAS_APARATUR_DESA, TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, PARTISIPASI

Sumber : Data Primer Diolah, Tahun 2021

Berdasarkan tabel output “ANOVA” diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (Sig) uji F sebesar 0,000. Karena dalam uji F dapat disimpulkan sebagai contoh bahwa independen (X_1) dan (X_2) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap dependen (Y) atau berarti signifikan karena kurang dari 0,05. Dengan demikian, maka persyaratan agar kita dapat memakai nilai koefisien determinasi dalam analisis regresi linear berganda sudah terpenuhi.

Uji T

Uji T digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji T dapat diketahui hipotesis diterima atau ditolak, sehingga dengan ini dapat menguji variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen atau tidak. Variabel-variabel terkait yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan kapasitas aparatur mempengaruhi kinerja pengelolaan dana desa. Uji T menggunakan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ atau 5%. Apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka tidak ada pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) atau hipotesis ditolak, dan apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima yang berarti variabel independen signifikan dengan variabel dependen. Berikut ini adalah hasil uji T dari output SPSS dari data penelitian.

Tabel 11
Hasil Uji T

Coefficients						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	-.900	2.948		-.305	.761
	Transparansi (X_1)	.494	.128	.362	3.846	.000
	Akuntabilitas (X_2)	.417	.121	.293	3.448	.001
	Partisipasi (X_3)	-.053	.137	-.036	-.386	.700
	Kapasitas Aparatur Negara (X_4)	.409	.084	.393	4.863	.000

a. Dependent Variable: KINERJA

Sumber : Data Primer Diolah, Tahun 2021

Dari tabel hasil Uji T tersebut maka dapat dijelaskan perumusan hipotesis sebagai berikut:

Transparansi

Transparansi menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis (X_1) dalam penelitian ini diterima. Oleh karena itu transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa.

H₁ : Transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa.

Akuntabilitas

Akuntabilitas menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis (X₂) dalam penelitian ini diterima. Oleh karena itu akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa.

H₂ : Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa.

Partisipasi

Partisipasi menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,700 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis (X₃) dalam penelitian ini ditolak. Oleh karena itu partisipasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa.

H₃ : Partisipasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa.

Kapasitas aparat

Kapasitas aparat menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis (X₄) dalam penelitian ini diterima. Oleh karena itu kapasitas aparat berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa.

H₄ : Kapasitas aparat berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa.

Pembahasan

Transparansi Berpengaruh Positif Signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri

Berdasarkan hasil uji hipotesis sebelumnya transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan dan desa. Hal ini berdasarkan pada hasil signifikan transparansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sebagai bentuk dari implementasi *governance* terkait pengelolaan dana desa, Kabupaten Kediri memiliki portal *e-Planning* tersebut semua pelaporan pengelolaan dana desa untuk desa-desa di Kabupaten Kediri dapat dipantau langsung oleh publik. Semua desa wajib menyampaikan laporan rutin melalui web tersebut, sebagai bentuk transparansi desa dalam mengelola dana desa, dan juga menginformasikan dengan cara menempel sebuah banner yang berisi laporan dana desa agar masyarakat dapat melihat langsung. Tujuan dari semua itu agar terbentuknya desa mandiri yaitu pemerintah desa yang mengedepankan transparansi, akuntabel, dan partisipatif.

Hasil ini didukung oleh penelitian Umami dan Nurodin (2017), Juniardi (2015), dan Hendri (2016), menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Akuntabilitas Berpengaruh Positif Signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri

Berdasarkan hasil uji hipotesis variabel akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan dan desa. Hal ini berdasarkan pada hasil signifikan akuntabilitas sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Dimana Dana Desa harus dimanfaatkan dan digunakan untuk kepentingan Desa dan pelaksanaannya diawasi bersama serta dilengkapi dengan laporan-laporan secara tertulis agar dapat dipertanggungjawabkan Budiati *et al.*, (2019). Jika masyarakat menemukan kejanggalan dapat langsung ditanyakan kepada Kepala Desa. Laporan-laporan tersebut sebagai contoh bentuk akuntabilitas dari pengelolaan dana desa. Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja organisasi dikarenakan, akuntabilitas adalah bentuk pertanggung jawaban dari agent kepada principal. Kesuksesan kinerja organisasi ditentukan dari keselarasan antara agent dan principal, akuntabilitas yang baik dalam organisasi akan mengurangi konflik yang terjadi.

Hasil ini didukung oleh penelitian Risya dan Idang (2017) dan Gayatri *et al.*, (2017), menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, yang dilihat dari hasil kesuksesan dari organisasi tersebut. Kesuksesan dari organisasi dapat dilihat dari kinerja yang baik. Sehingga akuntabilitas berpengaruh terhadap kesuksesan organisasi dalam kinerja perangkat desa yang baik.

Partisipasi Tidak Berpengaruh Signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri

Berdasarkan hasil uji hipotesis variabel partisipasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan dan desa. Hal ini berdasarkan pada hasil signifikan transparansi sebesar 0,700 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis yang diajukan atau hipotesis ketiga (X3) ditolak. Hal tersebut diduga karena rendahnya partisipasi perangkat desa dan masyarakat dalam suatu desa tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan dana desa. Jumlah dari partisipasi belum tentu menjamin keefektifan kinerja pengelolaan dana desa dalam mengambil keputusan dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan atau direncanakan oleh Pemdes Purwoasri. Dalam partisipasi perangkat desa dan masyarakat hanya atas dasar memenuhi regulasi yang menyatakan bahwa masyarakat harus ikut serta dalam rapat koordinasi.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan Tarjono dan Nugraha (2015), karena partisipasi masyarakat mempunyai peran penting dalam otonomi daerah karena dalam partisipasi terdapat aspek pengawasan dan aspirasi, tetapi masyarakat tidak banyak yang ikut partisipasi dalam rapat koordinasi dan ada beberapa desa yang melakukan rapat yang tidak ikut sertakan masyarakat. Tarjono dan Nugraha (2015) menyebutkan bahwa partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung.

Kapasitas Aparatur Desa Berpengaruh Signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri

Berdasarkan hasil uji hipotesis sebelumnya kapasitas aparatur berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa. Hal ini berdasarkan pada hasil signifikan transparansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Kapasitas aparatur merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan yang menghasilkan pada tingkat, mengidentifikasi karakteristik, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan oleh individu yang memungkinkan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif sehingga tercapainya standar kualitas profesional dalam bekerja. Aparatur desa harus memiliki sikap kepercayaan dan nilai serta berfikir kreatif dan inovatif, mempunyai keahlian dan keterampilan yang dimiliki khusus yang berhubungan dengan kompetensi, berpengalaman dalam menguraikan berbagai tugas dan masalah, memiliki motivasi yang tinggi dalam bekerja serta mempunyai pola berpikir yang relatif konseptual dan berpikir analitis dalam kerjanya, maka semakin jelas kemampuan yang dimiliki seseorang dapat mempengaruhi apa yang akan dikerjakannya dan nantinya diharapkan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan kinerja keuangan desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang diteliti oleh Budiati *et al.*, (2019) dan Finta dan Heru (2017), yang menyatakan kapasitas aparatur berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan dana desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Simpulan hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut: (1) Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri, (2) Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri, (3) Partisipasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri, (4) Kapasitas aparatur desa berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri.

Saran

Maka saran untuk Pemerintah desa disarankan lebih proaktif melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa yaitu dalam rapat-rapat koordinasi pembahasan ADD dan DD. Untuk meningkatkan kompetensi aparat perangkat desa dalam memahami isi dari peraturan-peraturan terkait pengelolaan dana desa, pemdes perlu untuk memberikan pelatihan-pelatihan, bimtek dan sosialisasi peraturan-peraturan yang terkait dengan pengelolaan dana desa. Aparatur desa di Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri sebagai pengelola keuangan desa sebaiknya meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pelatihan mengenai penyusunan laporan keuangan yang baik dan benar sehingga akuntabilitas dapat berjalan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Atiq, F. 2018. *Kampusnesia*. Pemerintahan kabupaten demak alokasikan dana desa: <http://www.kampusnesia.com>. 01 Desember 2020 (18:02)
- Astuti, T. P., Yulianto. 2016. Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 1(1):1-14
- Budiati, Y., E. K. Sugiyanto, dan A. Niati. 2019. Pengaruh Gcg Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa Dengan Moderasi Sistem Pengendalian Internal. *EKUITAS Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 3(4): 426 - 444.
- Coryanata, I. 2007. Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Moderating hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). *Simposium Nasional Akuntansi X Unhas Makasar*. 28(7): 26-28
- Eni, D. S. 2020. Determinan Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*. 23(1): 99-111
- Finta, M dan F. Heru. 2017. Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 18(2): 172-182
- Gayatri, M., Latri Y. dan Widhiyani N. L. S. 2017. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. 10 (2): 175-182
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi Ke 9*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Hendri, S. BS. 2016. Pengaruh Sumber daya manusia, Sarana dan Prasarana terhadap kinerja pengelolaan Keuangan desa di kabupaten lombok tengah. *Journal Samudra Ekonomika*. 4 (1): 2541-2850.
- Juniardi. 2015. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur, *ejournal Administration Reform*. 112-124.

- Mahsun, M. 2014. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. BPFE, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009, *Akuntabilitas Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta.
- _____. 2012. *Perpajakan*. CV. Andi Offset. Yogyakarta.
- Munti, F. dan H. Fahlevi. 2017. Determinan kinerja pengelolaan keuangan desa: studi pada kecamatan gandapura kabupaten bireuen aceh. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 18(2): 172-182
- Niwayan, R. 2016. *Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa*. *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, Lampung: 1 - 18
- Nurdianti, R. dan Anita. 2014. Pengaruh karakteristik tujuan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah di kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 1 (1) : 58-71.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*. 2014. Lembaran Salinan Negara Republik Indonesia Tahun 31 Desember 2014. Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang *Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*. Lembaran Salinan Negara Republik Indonesia Tahun 2014. Jakarta
- Rahadian, A. 2008. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Rafar, T. M., H. Fahlevi dan H. Basri. 2015. Pengaruh kompetensi pengelola keuangan dan akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Administrasi Akuntansi*, 4 (2): 125-135.
- Risya, U., and N. Idang. 2017. Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi. Jurnal Akuntansi, Pajak dan Manajemen*, 6 (11): 74-80
- Sekaran, U. 2011. *Research Methods For Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis)*. Salemba Empat. Jakarta
- Soleh, A., Susanto, F., Dan Susanti, R. 2017. Persepsi Aparatur Pemerintah Desa terhadap Dana Desa di Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma. *Ekombis Review*. 31(7): 114 - 125
- Sri, M. S. 2016. Pemkab demak alokasikan dana desa <https://kabar24.bisnis.com/read/20160407/78/535358/setiap-desa-di-kabupaten-kediri>. 27 Desember 2020 (18:45)
- Sugiyono. 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- _____. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- _____. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Tarjono, dan A. Nugraha. 2015. Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Desentralisasi Organisasi terhadap Kinerja Manajerial dengan Pengawasan Internal sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Analisis pada Pemerintah Kabupaten Pematang). *Jurnal Media Ekonomi Dan Manajemen* 1 (1): 85-100.
- Umami, R. dan I. Nurodin. 2017. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*. 6 (11): 74-80.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Desa*. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta.
- Wibowo. 2011. *Manajemen Perubahan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Zahro, S. 2012. *Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Dalam Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Studi Kasus Instansi Pemerintah Se- Kota Madiun)*. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.